

**Analisis Dampak Penyelenggaraan Kota Sehat terhadap IPM Kota Banjarmasin
Tahun 2010-2017**

*Analysis of The Impact of The Implementation of The Healthy City of The HDI
of Banjarmasin City 2010-2017*

Farah Diba*, Saipudin

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
[*farahdiba19fsq@gmail.com](mailto:farahdiba19fsq@gmail.com)

Abstract

This study aims to determine the impact of Healthy Cities' implementation on Banjarmasin City HDI from 2010 to 2017 to find out how the effect of implementing healthy cities on HDI in Banjarmasin City as a first step in taking policies related to the implementation of healthy cities.

This study's scope was to analyze the impact of the implementation of a healthy city on the Banjarmasin HDI in 2010-2017. The use of data analysis techniques in this study is descriptive, namely collecting, dividing, and deciphering the data obtained. The objective results obtained from the problem of an analysis of the effects of monitoring data.

This study indicates that the implementation of a healthy city has a positive impact on increasing the Human Development Index in Banjarmasin City. This can be seen from the increase in the Human Development Index of Banjarmasin City from year to year. Organizing healthy cities can also make health services better from year to year and can be felt well by the community.

Keywords: Organizing Healthy Cities, Human Development Index, Banjarmasin City

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penyelenggaraan Kota Sehat terhadap IPM Kota Banjarmasin tahun 2010 sampai tahun 2017. Agar pemerintah kota dapat mengetahui bagaimana dampak penyelenggaraan kota sehat terhadap IPM di Kota Banjarmasin sebagai langkah awal dalam mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan kota sehat.

Ruang lingkup penelitian ini untuk menganalisis dampak penyelenggaraan kota sehat terhadap IPM Kota Banjarmasin tahun 2010-2017. Penggunaan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu mengumpulkan, membagi, dan menguraikan data yang didapat, maka didapat hasil objektif dari permasalahan suatu analisa dari hasil pemantauan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kota sehat berdampak secara positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banjarmasin. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Kota Banjarmasin dari tahun ke tahun. Penyelenggaraan kota sehat juga mampu menjadikan pelayanan kesehatan lebih baik dari tahun ke tahun dan dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat.

Kata Kunci : Penyelenggaraan Kota Sehat, Indeks Pembangunan Manusia, Kota Banjarmasin

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang terjadi akibat dari meningkatnya pendapatan masyarakat disuatu wilayah yang dikarenakan meningkatnya produksi barang dan jasa, output (barang yang diproduksi) meningkat dengan meningkatnya teknologi dan inovasi serta kreatifitas yang muncul akibat dari pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor industri, telah membuat adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota, maka timbullah berbagai persoalan yang menyangkut lingkungan hidup manusia. Perkembangan teknologi dan pemanfaatan sumber-sumber daya yang tidak berkeputusan, serta terhambatnya konsentrasi penduduk di daerah perkotaan, usaha-usaha melindungi dan memelihara lingkungan yang aman dan sehat merupakan suatu keharusan. Kebutuhan akan udara, air, dan tanah semakin bertambah dengan bertambahnya penduduk, padahal batas-batas negara tidak berubah. Tersedianya sumber daya alam jelas terbatas, sehingga timbul perasaan bahwa kualitas lingkungan menjadi makin menurun. Pencemaran air, pengotoran udara dan pencemaran tanah semakin bertambah. Kehidupan desa dan kota tidak tenang serta terdapat sampah dimana-mana.

Menurut Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan hak otonom pemerintah daerah dalam membuat wewenang atau kebijakan, mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan apa yang diperlukan masyarakat di daerahnya sendiri. Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan yang pasti akan berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, maka pemerintah harus serius dalam menangani kesehatan. Kesehatan adalah salah satu faktor pendukung dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia di suatu daerah. Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia tidak terlepas dari beberapa faktor yang meliputinya. Salah satunya adalah Kesehatan, kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan Pembangunan suatu daerah.

Ekonomi dalam bidang kesehatan merupakan disiplin ilmu ekonomi yang diterapkan kepada topik-topik kesehatan (untuk pembahasan lebih mendetail tentang masalah ini lihat antara lain pada Williams, 1979 dalam (Reksohadiprojo, 2001)).

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh para ekonom dalam memberikan penjelasan kepada para dokter, tenaga medis selain dokter, pasien, politisi dan para pengambil keputusan bidang kesehatan lainnya yang terutama ialah mencoba untuk mengubah pola pikir mereka. Untuk dapat berfikir bagaimanakah yang paling *cost-effective*?

Bagi pembangunan ekonomi, kualitas buruh adalah lebih penting. Pekerja tidak terampil, meski bekerja dengan jam kerja panjang, akan memperoleh pendapatan perkapita yang rendah (Jhingan, 2010). Memelihara kesehatan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial maupun ekonomi masyarakat, sehingga diharapkan dalam penyelenggaraan kota sehat ini masyarakat mampu secara mandiri dalam mensejahterakan dirinya sendiri maupun keluarganya baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan ekonomi. Yang kemudian mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara menyeluruh.

Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana dampak dari penyelenggaraan kota sehat terhadap IPM Kota Banjarmasin tahun 2010-2017.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dari penyelenggaraan kota sehat terhadap IPM Kota Banjarmasin tahun 2010-2017.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu cabang keilmuan yang berobjek pada individu dalam masyarakat yang secara etimologi ekonomi terdiri dari dua suku kata Bahasa Yunani yaitu *oikos* dan *nomos* yang berarti pengaturan dalam rumah tangga. Pengaturan yang dimaksud bisa dari lingkup rumah tangga pribadi maupun rumah tangga Negara.

Ilmu ekonomi oleh Samuelson diberi Batasan sebagai suatu studi tentang bagaimana manusia dan masyarakat melakukan pilihan dengan atau tanpa menggunakan sarana uang- untuk memanfaatkan sumberdaya yang langka dalam menghasilkan berbagai barang dan jasa dan mendistribusikan diantara mereka bagi keperluan konsumsi, pada saat ini atau di masa mendatang, diantara berbagai manusia dan kelompok yang ada di masyarakat. "Ilmu ini juga menganalisis biaya-biaya dan manfaat dari membaiknya pola alokasi sumber daya (dalam Samuelson, 1976,h.5).(Reksohadiprodjo, 2001)). Dapat difahami terlebih dahulu bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu disiplin ilmu. Ilmu ekonomi merupakan suatu kesatuan pemikiran sehingga bukan hanya seperangkat alat saja.

Bagi pembangunan ekonomi, kualitas buruh adalah lebih penting. Pekerja tidak terampil, meski bekerja dengan jam kerja panjang, akan memperoleh pendapatan perkapita yang rendah (Jhingan, 2010). Perilaku hidup bersih sehat (PHBS) merupakan upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat, dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku melalui pendekatan pimpinan (advocacy), bina suasana (social support) dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Dapat mengenali dan mengatasi masalah kesehatan sendiri, masyarakat hendaknya dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya. (Notoatmodjo, 2007).

Ekonomi kesehatan merupakan disiplin ilmu ekonomi yang diterapkan kepada topik-topik kesehatan (untuk pembahasan lebih mendetail tentang masalah ini lihat antara lain pada Williams, 1979 dalam (Reksohadiprodjo, 2001)). Dengan demikian apa yang dilakukan oleh para ekonom dalam memberikan penjelasan kepada pada dokter, tenaga medis selain dokter, pasien, politisi dan para pengambil keputusan bidang kesehatan lainnya yang terutama ialah mencoba untuk mengubah pola pikir mereka. Untuk dapat berfikir bagaimanakah yang paling *cost-effective*?

Kesehatan

Pelaksanaan kesehatan di Indonesia berlandaskan atas dasar hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Serta Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

WHO merumuskan pengertian kesehatan adalah sebagai : "a state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity". (WHO, 1948), yang berarti suatu kondisi fisik yang sejahtera, mental, sosial atau budayadengan tidak ada keluhan sama sekali (baik secara cacat fisik maupun atau sakit secara medis).

Kesehatan juga termasuk kedalam faktor yang paling utama, yang dapat diperlihatkan melalui kesehatan jasmani atau rohani, baik dilihat dari keadaan badan, atau cara berfikir yang menandakan orang tersebut sehat. Masyarakat yang sehat pasti menambahkan kehidupan yang bahagia, dengan sehat maka kebahagiaan awal akan dapat tercapai.

Kebahagiaan kehidupan yang di inginkan masyarakat tentu sehat bahagia yang hendaknya ditampakkan secara sehat fisik, bugar, baik dalam penampilan, bagus, awet muda, dan tidak lekas mengalami keriputan. Tidak ada seorangpun yang ingin mengalami sakit atau terganggu kesehatannya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli

Kota sehat merupakan keadaan suatu tempat atau wilayah kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk ditinggali masyarakat, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati oleh masyarakat dan pemerintah daerah. (Dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor: 1138/Menkes/Pb/Viii/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat).

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dari Astri Vonita Ardianti (2015) yang berjudul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Kabupaten Jember" menunjukkan bahwa pendidikan, pelayanan kesehatan, PHBS, dan PDRB berpengaruh terhadap angka harapan hidup. Berpengaruh secara simultan ditunjukkan dengan nilai probabilitas F hitung 0,001240 lebih kecil dari level signifikan $\alpha(5\%)$ yang berarti bahwa pendidikan, pelayanan kesehatan, PHBS, dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap angka harapan hidup di Kabupaten Jember.

Penelitian Nur Baeti (2013) yang berjudul "Analisis Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten ./ Kota Jawa Tengah tahun 2007-2011" menunjukkan bahwa Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah baik secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap IPM.

Penelitian Abdul Aziz Nasution (2008) yang berjudul "Analisis Dampak Realisasi APBD terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Binjai" menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah sector pendidikan (X1) dan pengeluaran pemerintah sector kesehatan (X2) berpengaruh positif terhadap IPM (Y) yang signifikan pada alfa 10%.

Penelitian Septian Bagus Pambudi (2008) yang berjudul "Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten /

Kota di Provinsi Jawa Barat” menunjukkan bahwa peningkatan PAD akan meningkatkan IPM kabupaten/kota di Jawa Barat. Jika komponen PAD yaitu pajak, retribusi, laba badan usaha milik daerah meningkat maka IPM kabupaten/kota di Jawa Barat akan meningkat.

Penelitian M. Ilham Irawan (2009) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia” menunjukkan tiga dari empat variable memberikan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, yaitu PDB, anggaran pengeluaran pemerintah, penanaman modal asing dan variable lainnya yaitu penanaman modal dalam negeri tidak signifikan tetapi memberikan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Kota Banjarmasin khususnya yang terkait dengan Penyelenggara Kota-Sehat dan Indeks Pembangunan Manusia Kota Banjarmasin yang sangat menarik dan berpotensi untuk dikembangkan.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian untuk menggambarkan secara sistematis fakta, karakteristik populasi, atau bidang tertentu (Nurlina T. Muhyiddin, 2017)

Tempat / Lokasi Penelitian

Adapun tempat/ lokasi penelitian yang dijadikan sebagai objek penelitian ini adalah Kota Banjarmasin, ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dari Forum Kota Sehat, Tim Pembina Kota Sehat, dan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kota Banjarmasin.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengambilan sampel Non-Probability Sampling dengan teknik Purposive Sampling (sampel pertimbangan). Purposive Sampling (sampel pertimbangan) merupakan satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki terutama apabila hanya ada sedikit orang yang mempunyai keahlian (expertise) di bidang yang sedang diteliti (Sugiyono, 2011). Peneliti mengambil sampel 3 responden, dimana responden tersebut ialah orang yang dianggap berpengaruh dalam penyelenggaraan kota-sehat dan mengetahui tentang pembangunan Kota Banjarmasin.

4.5 Definisi Operasional Variabel

Penyelenggaraan Kota-Sehat

Penyelenggaraan Kota-Sehat adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk mencapai suatu tempat atau wilayah kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk ditinggali masyarakat, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati oleh masyarakat dan pemerintah daerah. (Dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor: 1138/Menkes/Pb/Viii/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks yang terdiri dari:

1. Indeks Harapan Hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir.
2. Indeks Pendidikan, yang diukur dengan kombinasi antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
3. Indeks Standar Hidup Layak, yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan atau paritas daya beli.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari arsip-arsip atau dokumen Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin mengenai pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banjarmasin pada tahun 2010-2017. Dan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak atau informasi yang terdiri dari Ketua Forum Kota-Sehat Kota Banjarmasin, Anggota dari Tim Pembina Kota-Sehat Kota Banjarmasin, serta Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Barenlitbangda Kota Banjarmasin.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis kuantitatif yang merupakan analisis data berbentuk numerik/angka yang pada dasarnya pendekatan ini menggambarkan data melalui angka-angka, seperti data Indeks Pembangunan Manusia dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan. Penelitian ini juga memberikan gambaran dan menganalisis pengaruh Penyelenggaraan Kota-Sehat terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

HASIL DAN ANALISIS

1.) Gambaran Umum Objek Penelitian

Secara geografis, Kota Banjarmasin terletak diantara: 3°15' - 3°22' Lintang Selatan dan 114°32' Bujur Timur. Keadaan tanah Kota Banjarmasin berada pada ketinggian 0,16 m di bawah permukaan laut dan rata-rata wilayah di Kota Banjarmasin tergenang air saat air pasang. Kota Banjarmasin berlokasi daerah kuala sungai Martapura yang bermuara pada sisi timur SungaiBarito. Letak Kota Banjarmasin nyaris di tengah-tengah Indonesia.

Kota Banjarmasin berbatasan dengan Tepian Timur SungaiBarito yang dibelah oleh Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus. Menurut data statistik 2001 dari seluruh luas wilayah Kota Banjarmasin yang kurang lebih 98,46 km². Perubahan dan perkembangan wilayah terus terjadi seiring dengan penambahan kepadatan penduduk dan kemajuan tingkat pendidikan serta penguasaan ilmu pengetahuan teknologi. Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin Tahun 2017, Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 692.793 jiwa.

Tabel 1
Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kota Banjarmasin Tahun 2017

Kelompok Umur	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0-4	64.366	65.630	66.553	67.227	67.649	67.184	66.384	65.595
5-9	56.868	57.498	58.210	59.012	59.852	61.215	62.509	63.484
10-14	52.789	53.027	53.358	53.733	54.232	54.871	55.529	56.266
15-19	56.518	56.343	56.293	56.314	56.418	56.608	56.897	57.295
20-24	63.203	63.142	63.008	62.787	62.572	62.351	62.209	62.201
25-29	58.883	58.871	58.768	58.673	58.644	58.672	58.652	58.574
30-34	57.378	57.447	57.557	57.604	57.637	57.515	57.540	57.483
35-39	52.510	53.407	54.102	54.697	55.172	55.674	55.788	55.940
40-44	45.708	47.146	48.554	49.874	51.063	52.061	52.994	53.726
45-49	37.081	38.475	39.909	41.370	42.842	44.287	45.723	47.129
50-54	28.843	30.375	31.817	33.223	34.653	36.153	37.548	38.985
55-59	21.205	22.533	24.015	25.578	27.130	28.607	30.154	31.622
60-64	12.665	13.214	13.845	14.573	15.431	16.420	17.476	18.657
65-69	9.088	9.377	9.724	10.131	10.608	11.156	11.664	12.239
70-74	5.562	5.751	5.922	6.086	6.248	6.420	6.645	6.917
75+	5.532	5.637	5.768	5.896	6.072	6.244	6.471	6.680
Total	628 199	637 873	647 403	656 778	666 223	675 440	684 183	692 793

Sumber : BPS Kota Banjarmasin (2019, diolah)

Dapat dilihat dari tabel 1 pertumbuhan jumlah penduduk Kota Banjarmasin menurut kelompok umur pada tahun 2017 yang selalu mengalami peningkatan. Dengan padatnya penduduk Kota Banjarmasin, maka hendaknya ada upaya dari pemerintah untuk dapat mengatasi peningkatan penduduk yang selalu terjadi setiap tahun, dengan luas wilayah yang tetap. Agar Kota Banjarmasin menjadi kota layak huni dan tidak kumuh. Berikut luas wilayah Kota Banjarmasin, berdasarkan presentasi kecamatan terhadap Kota Banjarmasin.

Kota Banjarmasin memiliki 5 Kecamatan, yaitu :

- Kecamatan Banjarmasin Utara
- Kecamatan Banjarmasin Selatan
- Kecamatan Banjarmasin Barat
- Kecamatan Banjarmasin Timur
- Kecamatan Banjarmasin Tengah

Tabel 2
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Berdasarkan Presentase Terhadap Kota Tahun 2016

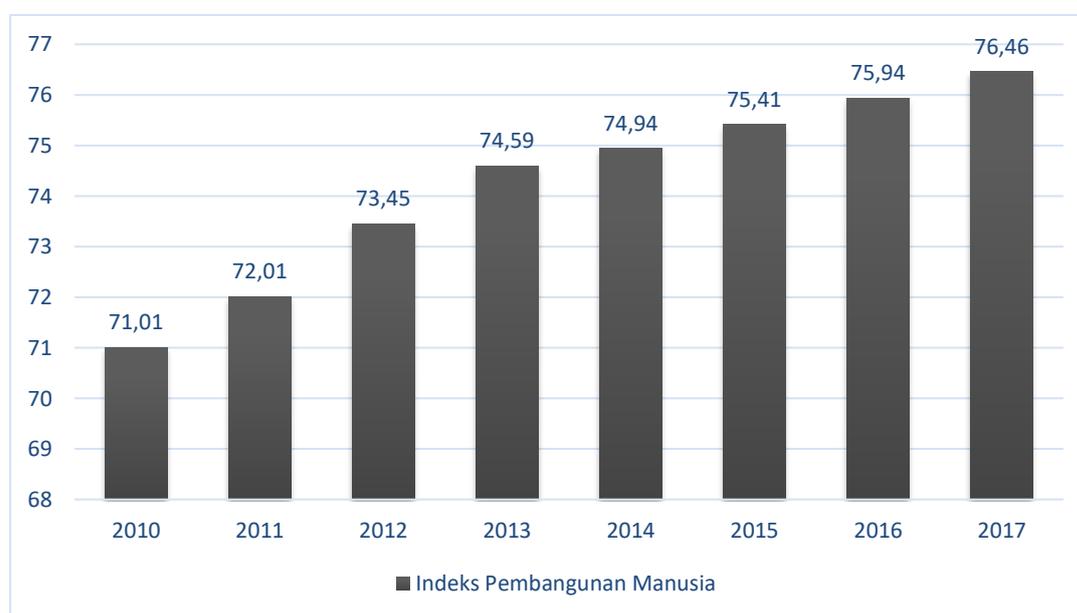
Kecamatan	Luas (Km ²)	Presentase (%)
Banjarmasin Utara	16,54	16,80
Banjarmasin Selatan	38,27	38,87
Banjarmasin Barat	13,13	13,34
Banjarmasin Timur	23,86	24,23
Banjarmasin Tengah	6,66	6,76

Sumber : Bagian Pemerintahan Kota Banjarmasin (2019, diolah)

Dari tabel 2 diatas, Kota Banjarmasin memiliki 52 Kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan. Kecamatan Banjarmasin Selatan memiliki luas wilayah paling luas daripada 4 kecamatan lainnya yang ada di Kota Banjarmasin yaitu 38,87% dari luas Wilayah Kota Banjarmasin atau setara dengan 38,27 Km². Lalu Kecamatan Banjarmasin Timur mencapai 23,86 Km², Kecamatan Banjarmasin Utara dengan luas mencapai 16,54 Km². Dan kecamatan Banjarmasin Barat 13,13 Km². Serta Kecamatan Banjarmasin Tengah yang memiliki luas hanya 6,66 Km². Namun, kecamatan Banjarmasin Tengah terletak ditengah kota dengan presentase strategis lebih luas dari pada 4 kecamatan lain yang ada di Kota Banjarmasin.

2.) Hasil penelitian

Tabel 1
Indeks Pembangunan Manusia Kota Banjarmasin Tahun 2010-2017



Sumber : BPS Kota Banjarmasin (2019, diolah)

Table 2
Indeks Pembangunan Manusia Kota Banjarmasin Tahun 2010-2012
(Sebelum Penyelenggaraan Kota Sehat)

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
2010	71,01
2011	72,01
2012	73,45

Sumber : BPS Kota Banjarmasin (2019, diolah)

Table 3
Indeks Pembangunan Manusia Kota Banjarmasin Tahun 2013-2017

Tahun	Indeks pembangunan Manusia
2013	74,59
2014	74,94
2015	75,41
2016	75,94
2017	76,46

Sumber : BPS Kota Banjarmasin (2019, diolah)

Pada tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia terlihat selalu meningkat, hal ini terjadi akibat perbaikan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dari perbaikan kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur. Kewajiban untuk besekolah sampai dengan 9 tahun adalah wujud kebijakan yang diambil oleh pemerintah guna memperbaiki pendidikan daerah agar tidak tertinggal. Pemerintah juga menggaungkan pelayanan kesehatan pada tingkat posyandu dan puskesmas agar maksimal dalam pelayanan terhadap masyarakat. Di bidang infrastruktur pemerintah daerah berupaya dalam pembuatan dan perbaikan jalan, agar transportasi produksi dan distribusi barang dan jasa tersebar secara merata di Kota Banjarmasin.

Tabel 2 terlihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia sebelum terselenggaranya kota sehat yaitu pada tahun 2010 mencapai 71,01, kemudian naik pada tahun 2011 mencapai angka 72,01 dan pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 73,45. Peningkatan yang terjadi masih dalam tahap permulaan.

Tabel 3 merupakan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia setelah terselenggaranya kota sehat di Kota Banjarmasin, yang mana juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 sampai 2017 terjadi kenaikan secara berturut-turut mencapai 74.59, 74.94, 75.41, 75.94 dan 76.46. pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang sudah terdistribusi dengan baik di seluruh wilayah Kota Banjarmasin.

PENUTUP

Implikasi Penelitian

Implikasi Teoritis

Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh penyelenggaraan kota-sehat terhadap IPM Kota Banjarmasin dalam rangka percepatan pencapaian RPJMD Kota Banjarmasin. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Banjarmasin Khususnya Dinas Kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Banjarmasin. Bukan hanya derajat kesehatan namun juga mampu meningkatkan derajat kesejahteraan bagi masyarakat Kota Banjarmasin, dan mampu mengurangi kesenjangan antar status sosial yang ada di lingkungan masyarakat Kota Banjarmasin.

Implikasi Praktis

Pengaruh penyelenggaraan kota-sehat terhadap peningkatan IPM ini dapat digunakan pemerintah untuk menentukan apa yang paling dominan dalam mempengaruhi peningkatan IPM, sehingga dapat meningkatkan pembangunan manusia dan masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin melalui sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada Bab V, maka penelitian ini dapat digunakan dan dikembangkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dalam menghadapi permasalahan yang sejenis.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik serta melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini. Keterbatasan pada Penelitian ini meliputi subjektivitas yang ada pada peneliti. Penelitian ini sangat tergantung pada interpretasi yang tersirat dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dampak positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam penyelenggaraan Kota-Sehat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin beserta jajarannya. Dengan penyelenggaraan Kota-Sehat Kota Banjarmasin mampu mendorong percepatan pencapaian Rancangan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin. Seperti, menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dan menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI).

Penyelenggaraan kota sehat mampu mendorong masyarakat agar turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Masyarakat yang notabene adalah sebagai pengguna, maka diharuskan mampu menjaga dan terus mengembangkan serta menjembatani potensi yang terdapat di daerah agar sampai kepada pemerintah kota selaku mengambil kebijakan di daerah. Sehingga terciptanya sinergisitas Antara masyarakat dan pemerintah kota, untuk menjadikan kota yang sehat, sejahtera secara sosial dan ekonomi.

Anggaran kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin pada Pagu Anggaran Tahun 2019 mencapai Rp 87.145.537.000 (sumber DPA Dinas Kesehatan Tahun 2019) Angka ini tidak bisa menangani seluruh isu kesehatan yang ada di Kota Banjarmasin yang sangat luas indikator kesehatannya. Oleh sebab itu di perlukannya suatu program yang dapat meliputi seluruh aspek kesehatan yang mana anggarannya terdapat di beberapa SKPD yang terkait atasnya.

Penyelenggaraan Kota-Sehat adalah salah satu program pemerintah di bidang kesehatan yang mana indikatornya meliputi seluruh indikator kesehatan yang menyeluruh. Penyelenggaraan Kota Sehat juga sebagai bentuk jendela informasi dari program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah agar sampai kepada masyarakat serta sebagai wujud akuntabilitas pemerintah dalam bidang kesehatan untuk mewujudkan Banjarmasin Barasih wan Nyaman.

Keterkaitan antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sangat erat dengan tujuan yang akan dicapai dalam penyelenggaraan kota sehat. Sinergisitas pemerintah kota dan SKPD (jajaran) didalamnya serta pemberdayaan masyarakat secara optimal dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banjarmasin tahun 2010 sampai dengan tahun 2017.

Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut yaitu (1) bagi Pemerintah diharapkan mampu mengkaji berbagai program yang sudah ada guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banjarmasin agar dapat bersinergi dalam program penyelenggaraan kota sehat di Kota Banjarmasin (2) Penyelenggaraan kota sehat diharapkan bukan sekedar euphoria dalam meraih penghargaan, namun harus diupayakan agar menjadi kebiasaan (habits) dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk dan terhindar dari berbagai penyakit (3) Pemerintah Kota Banjarmasin diharapkan mampu bersikap tegas untuk jajarannya dalam rangka penyelenggaraan Kota-Sehat Kota Banjarmasin, agar pada saat pengumpulan data dapat terselesaikan dengan baik pada waktu yang telah ditetapkan. Serta dapat memperoleh hasil yang

sudah ditargetkan (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banjarmasin hendaknya mampu memberikan kontribusi yang lebih maksimal dengan telah menyiapkan terlebih dahulu data yang diperlukan pada penyelenggaraan Kota-Sehat Kota Banjarmasin agar data yang disiapkan lebih detail dan rinci karena adanya batas waktu yang cukup panjang dalam pengumpulan data sebagai syarat dalam melakukan penilaian dan diharapkan dapat meraih penghargaan yang lebih baik (5) Masyarakat didorong agar dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan kota sehat dengan cara ikut andil dalam berbagai kegiatan yang ada di dalam program penyelenggaraan kota sehat, terus menjaga kebersihan, ikut andil dalam menjaga keamanan, dan kenyamanan, serta peduli dengan kesehatannya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik (6) Penelitian ke depan hendaknya dapat menjadikan banyak variable yang memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam penelitian, agar penelitian selanjutnya dapat di lihat dari sudut pandang yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Jhingan, M. L. (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Reksohadiprodjo, S. . (2001). *Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- RI, Depkes. (2009).
- Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor: 1138/Menkes/Pb/Viii/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat).